

ABSTRAK

Dini Mawaddah, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk Pembuatan dan Penyebaran Konten Deepfake Pornografi di Media Sosial dalam Wilayah Hukum Polda Jawa Barat.*

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) telah menghadirkan berbagai inovasi, salah satunya adalah teknologi *deepfake* dimana memungkinkan seseorang manipulasi wajah dan tubuh orang lain sehingga terlihat realistis. Namun, kemajuan ini tidak lepas dari penyalahgunaan, terutama dalam pembuatan dan penyebaran konten *deepfake* pornografi di media sosial, hal ini menimbulkan trauma psikologis, perusakan reputasi, hingga pengucilan sosial yang merugikan korban. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam menjalankan penegakan hukum secara efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi AI untuk pembuatan dan penyebaran konten *deepfake* pornografi di media sosial dalam wilayah hukum Polda Jawa Barat, kendala Polda Jawa Barat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi AI untuk pembuatan dan penyebaran konten *deepfake* pornografi di media sosial, dan upaya yang dilakukan Polda Jawa Barat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi AI untuk pembuatan dan penyebaran konten *deepfake* pornografi di media sosial.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, yang mengkaji peraturan perundang-undangan berdasarkan teori hukum dan praktik pelaksanaannya. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Polda Jawa Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi AI untuk pembuatan dan penyebaran konten *deepfake* pornografi di media sosial oleh Polda Jawa Barat masih belum optimal. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum, seperti sulitnya pelacakan jejak digital pelaku, keterbatasan sarana digital forensik, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Sementara itu bisa berbagai upaya preventif dan represif untuk mengatasi kendala tersebut, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan laboratorium digital mandiri, hingga edukasi publik untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum Polda Jawa Barat.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence, Deepfake Pornografi, Penegakan Hukum*